KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN PADA MASYARAKAT NAGARI TANJUNG AMPALU KABUPATEN SIJUNJUNG

Difa Audina[1], Awaluddin[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : divaaudina4@gmail.com[1], awaluddin@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat pedesaan yang belum terselesaikan secara optimal. Daya pemahaman masyarakat terhadap layanan serta bentuk kesepakatan dalam sistem keuangan berbasis syariah masih berada pada tingkat yang terbatas, termasuk di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, di mana sebagian besar penduduk belum sepenuhnya menangkap perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan umum, sementara penggunaan layanan berbasis syariah juga belum berkembang secara optimal; keadaan ini dipengaruhi oleh minimnya proses pemberian pengetahuan, keterbatasan jangkauan layanan, serta penyebaran informasi yang belum berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menelaah tingkat pemahaman masyarakat terhadap gagasan keuangan berbasis syariah, mengidentifikasi peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan pemberian wawasan dan penyebaran informasi, serta menilai bentuk kerja sama dengan lembaga lokal dalam upaya meningkatkan daya tangkap dan keterjangkauan layanan keuangan syariah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan; hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terutama terkait konsep dasar, mekanisme kesepakatan, serta karakteristik produk dan layanan syariah, sementara lembaga keuangan syariah telah berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengenalan produk, namun kontribusi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan intensitas sosialisasi, akses layanan yang belum memadai, faktor jarak, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional maupun sistem keuangan informal. Dari aspek inklusi keuangan, pemanfaatan produk perbankan syariah juga masih rendah karena sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman dan tingkat kepercayaan yang memadai terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara perbankan syariah, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan guna memperluas literasi serta meningkatkan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan di Nagari Tanjung Ampalu.

Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Nagari Tanjung Ampalu.*

ABSTRACT

This study was prompted by the persistently inadequate level of Islamic financial literacy and inclusion within rural communities, a circumstance that remains insufficiently addressed. Public comprehension of Sharia-compliant financial products and contractual mechanisms is still constrained, particularly in Nagari Tanjung Ampalu, Sijunjung Regency, where a considerable proportion of residents have yet to discern the fundamental distinctions between Islamic and conventional banking systems. Furthermore, the utilization of Islamic financial services remains suboptimal due to limited educational exposure, restricted service accessibility, and the absence of sustained dissemination initiatives. This research seeks to examine the community's understanding of Islamic financial principles, identify the contributions of Islamic banking institutions in promoting financial awareness and product dissemination, and assess collaborative efforts between Islamic banks and local institutions in fostering financial literacy and inclusion. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that the level of Islamic financial literacy among residents of Nagari Tanjung Ampalu remains relatively modest, particularly regarding foundational banking concepts, Sharia contractual arrangements, and the distinguishing characteristics of Islamic and conventional financial institutions. Islamic banking entities have contributed to enhancing financial literacy and inclusion through educational programs, outreach activities, and the introduction of Sharia-based financial products and services. Nevertheless, these contributions have not attained their full potential due to several impediments, including the lack of continuous socialization, limited banking infrastructure, geographical constraints, and the enduring reliance of community members on conventional and informal financial institutions. From the perspective of financial inclusion, the adoption of Islamic banking products remains limited, as a segment of the population has not yet developed sufficient understanding or confidence in Sharia-compliant financial services. Consequently, a more robust synergistic partnership among Islamic banking institutions, the nagari government, and community organizations is indispensable for advancing Islamic financial literacy and inclusion within Nagari Tanjung Ampalu.

Keywords : *Islamic Banking, Financial Literacy, Financial Inclusion, Nagari Tanjung Ampalu.*

PENDAHULUAN

Pemahaman serta keterjangkauan terhadap layanan berbasis keuangan memiliki posisi yang sangat esensial dalam menopang kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat laju perkembangan ekonomi. Kemampuan seseorang dalam menafsirkan, mengelola, serta menetapkan pilihan yang tepat atas berbagai produk dan fasilitas keuangan menjadi bagian dari kecakapan penting dalam kehidupan modern, sedangkan keterjangkauan mengacu pada luas tidaknya peluang masyarakat untuk menjangkau lembaga serta layanan keuangan formal yang tersedia (OJK, 2022). Tingkat literasi yang baik akan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara lebih bijaksana, sementara inklusi keuangan yang tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas keuangan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, penguatan pemahaman serta keterjangkauan layanan berbasis keuangan kian mendapat sorotan. Pemerintah bersama sejumlah institusi keuangan secara berkelanjutan berupaya memperluas jangkauan layanan tersebut melalui ragam kegiatan pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi, perluasan jangkauan tersebut belum sepenuhnya beriringan dengan meningkatnya daya tangkap masyarakat terhadap berbagai produk yang dimanfaatkan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa sebagian kelompok masyarakat telah menggunakan fasilitas keuangan tanpa bekal pengetahuan yang cukup mengenai kegunaan, potensi risiko, maupun tata kerja dari layanan yang dipakai (OJK, 2022).

Gejala serupa juga tampak dalam ranah layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Walaupun kemajuan lembaga perbankan berbasis syariah di Indonesia memperlihatkan arah pertumbuhan yang semakin baik, tingkat pemahaman masyarakat mengenai landasan pokok sistem tersebut masih tergolong rendah. Sistem ini diposisikan sebagai pilihan lain dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan asas keadilan, keterbukaan, kerja sama, serta pertanggungjawaban sosial. Berbeda dari sistem perbankan umum, setiap bentuk layanan dan produk disusun berdasarkan kesepakatan yang selaras dengan ketentuan syariat sehingga diharapkan mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih berimbang serta berkesinambungan (Ascarya, 2019). Namun demikian, perkembangan institusi serta peningkatan aset belum sepenuhnya diiringi dengan naiknya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ragam layanan yang tersedia.

Pada tingkat nasional, keadaan pemahaman serta keterjangkauan layanan keuangan masih memperlihatkan jurang perbedaan. Hasil pendataan berskala nasional oleh otoritas terkait menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan kemampuan memahami konsepnya. Situasi ini menandakan bahwa penggunaan fasilitas keuangan berkembang lebih pesat daripada penguasaan pengetahuan masyarakat terhadapnya. Gambaran perkembangan ukuran pemahaman dan keterjangkauan layanan keuangan secara nasional dapat ditinjau pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Tahun	Literasi Keuangan (%)	Inklusi Keuangan (%)
2019	38,03	76,19
2022	49,68	85,10
2025	66,46	80,51

Sumber: OJK (2019; 2022; 2025)

Data tersebut mengisyaratkan bahwa walaupun terdapat kecenderungan peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu, jarak antara kemampuan memahami dan keterjangkauan layanan masih tampak lebar. Dalam ruang lingkup sistem keuangan berbasis nilai Islam, keadaan ini menjadi sorotan penting karena penguasaan terhadap gagasan dasar, bentuk kesepakatan, serta ciri khas produk sangat menentukan arah pilihan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Minimnya daya tangkap terhadap hal tersebut berpotensi membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan berbasis syariah, bahkan menganggapnya tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan pada umumnya.

Lembaga keuangan berbasis syariah pada hakikatnya tidak semata berperan sebagai perantara arus dana, melainkan juga memikul kewajiban moral untuk memperluas wawasan masyarakat melalui kegiatan penerangan dan penyebarluasan informasi. Keberhasilan pengembangan sektor ini tidak hanya diukur dari pertambahan aset maupun jumlah pengguna, tetapi juga dari sejauh mana lembaga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan harta yang selaras dengan nilai-nilai syariat (Antonio, 2018). Karena itu, peran lembaga tersebut dalam memperluas pemahaman dan keterjangkauan layanan menjadi isu yang layak diperhatikan, terutama pada kawasan pedesaan yang masih terbatas akses informasi serta sarana layanan keuangannya.

Salah satu daerah yang memperlihatkan kondisi demikian adalah Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung. Dari hasil pengamatan awal, sebagian penduduk masih memiliki pengetahuan yang belum memadai mengenai dasar-dasar sistem keuangan berbasis syariah. Banyak di antara mereka belum mampu membedakan secara tegas antara lembaga keuangan berbasis syariah dan sistem konvensional, termasuk cara kerja kesepakatan dalam produk yang digunakan. Selain itu, pemanfaatan layanan berbasis syariah belum menjadi pilihan utama karena masyarakat cenderung mempertimbangkan kemudahan akses serta kebiasaan lama yang telah mengakar. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah masih membutuhkan perhatian yang lebih mendalam.

Di sisi lain, akses terhadap layanan perbankan syariah di wilayah pedesaan masih relatif terbatas dibandingkan daerah perkotaan. Keterbatasan fasilitas layanan, minimnya kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, serta rendahnya keterlibatan lembaga lokal dalam mendukung edukasi keuangan syariah menjadi beberapa faktor yang turut memengaruhi rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah. Padahal, kerja sama antara perbankan syariah, pemerintah nagari, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat memiliki potensi besar dalam memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Keadaan ini memperlihatkan adanya jarak yang cukup nyata antara laju perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah di tingkat nasional dengan pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanpa diiringi penguatan kemampuan pemahaman yang memadai, maka kesempatan untuk mengembangkan sistem keuangan tersebut di wilayah-wilayah lokal akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Karena itu, diperlukan telaah yang lebih mendalam mengenai peran lembaga keuangan berbasis syariah dalam memperluas pemahaman serta keterjangkauan layanan keuangan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan yang masih terbatas dari segi akses maupun arus informasi.

Berangkat dari penjelasan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menelaah peran lembaga keuangan berbasis syariah dalam mendorong peningkatan kemampuan memahami serta keterjangkauan layanan keuangan masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi pemahaman dan

keterjangkauan layanan berbasis syariah di tengah masyarakat, wujud peran yang telah dijalankan oleh lembaga terkait, serta berbagai unsur yang memengaruhi tingkat keberhasilan upaya peningkatan pemahaman dan keterjangkauan layanan tersebut pada lingkup lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengkaji kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan syariah, sehingga relevan untuk mengkaji peran perbankan syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nasabah perbankan syariah, pihak perbankan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan terkait fokus penelitian. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual pemanfaatan layanan keuangan syariah di masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan lembaga keuangan, publikasi resmi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perbankan syariah. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Nagari Tanjung Ampalu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi langsung, penyuluhan kepada masyarakat, pemanfaatan forum keagamaan, kerja sama dengan pemerintah nagari, serta pengenalan produk perbankan syariah di lingkungan pendidikan. Bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa lembaga perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen edukasi dalam memperkenalkan konsep keuangan berbasis syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan, literasi keuangan syariah dipahami sebagai kemampuan masyarakat dalam memahami prinsip, akad, produk, serta mekanisme transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih berada pada kategori dasar. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, sementara pemahaman mengenai akad seperti murabahah, mudharabah, dan wadiah masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai perbankan syariah belum sepenuhnya mampu membentuk pemahaman yang komprehensif. Masyarakat mengenal

bank syariah pada tingkat konseptual yang sederhana, tetapi belum memahami karakteristik produk dan mekanisme operasionalnya secara mendalam. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh terbatasnya intensitas sosialisasi yang dilakukan serta belum meratanya akses informasi yang diterima oleh masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan konsep Financial Literacy Theory yang menjelaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga kemampuan memahami dan menggunakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih berada pada tahap awareness atau kesadaran awal sehingga belum berkembang menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk dan layanan yang tersedia.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyampaian informasi menjadi faktor penting dalam membentuk literasi masyarakat. Masyarakat cenderung lebih mudah memahami informasi apabila disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, penggunaan istilah teknis yang terlalu kompleks justru menyebabkan masyarakat sulit memahami konsep yang disampaikan. Oleh karena itu, keberhasilan program literasi keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kegiatan edukasi, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat Nagari Tanjung Ampalu masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum menggunakan produk maupun layanan perbankan syariah secara aktif. Penggunaan layanan keuangan formal masih didominasi oleh bank konvensional, sementara sebagian masyarakat lainnya masih memanfaatkan mekanisme keuangan tradisional seperti menyimpan uang di rumah atau meminjam kepada kerabat dan tetangga.

Rendahnya tingkat inklusi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan penggunaan layanan keuangan syariah. Meskipun sebagian masyarakat telah mengenal keberadaan bank syariah, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya mendorong mereka untuk menjadi pengguna aktif produk perbankan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi belum secara otomatis menghasilkan peningkatan inklusi apabila tidak diikuti oleh faktor pendukung lainnya.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah. Faktor pertama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai sistem operasional bank syariah. Ketidakpahaman terhadap mekanisme akad dan produk menyebabkan masyarakat merasa ragu untuk menggunakan layanan yang tersedia. Faktor kedua adalah kebiasaan masyarakat yang telah lama menggunakan bank konvensional sehingga muncul kecenderungan untuk mempertahankan layanan yang sudah dikenal dan dianggap lebih mudah digunakan.

Faktor ketiga berkaitan dengan aspek aksesibilitas layanan. Jarak yang relatif jauh menuju fasilitas perbankan syariah menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih lembaga keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemudahan akses sering kali menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan pertimbangan lainnya. Akibatnya, masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang lokasinya lebih dekat dan mudah dijangkau.

Temuan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat, tetapi juga oleh faktor akses, kenyamanan, dan ketersediaan layanan.

Semakin mudah layanan keuangan dijangkau oleh masyarakat, semakin besar peluang terjadinya peningkatan penggunaan produk keuangan syariah.

Kerja Sama Perbankan Syariah dan Pemerintah Nagari dalam Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara perbankan syariah dan pemerintah nagari telah dilakukan, meskipun masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan. Bentuk kerja sama yang ditemukan di lapangan umumnya berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah nagari melalui penyediaan tempat dan bantuan dalam mengumpulkan peserta kegiatan.

Keberadaan pemerintah nagari memiliki posisi yang strategis dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kedekatan pemerintah nagari dengan masyarakat menjadikannya sebagai penghubung yang efektif antara lembaga keuangan dan masyarakat. Melalui kerja sama yang lebih intensif, informasi mengenai layanan keuangan syariah dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang ada masih berfokus pada kegiatan penyampaian informasi dan belum berkembang ke arah program pemberdayaan yang berkelanjutan. Belum ditemukan program pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, maupun pembinaan penggunaan produk perbankan syariah yang dilakukan secara rutin. Akibatnya, masyarakat hanya memperoleh pengetahuan dasar tanpa mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan penggunaan layanan keuangan syariah secara langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program literasi dan inklusi keuangan akan meningkat apabila kerja sama yang terjalin tidak hanya berorientasi pada sosialisasi, tetapi juga mencakup pendampingan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Nagari Tanjung Ampalu. Pertama, meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi secara berkala dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, memperluas jangkauan layanan melalui pendekatan jemput bola, layanan keliling, atau agen perbankan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam proses edukasi keuangan syariah. Keterlibatan tokoh lokal dinilai mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Keempat, mengembangkan program pendampingan usaha berbasis syariah yang tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga pembinaan dalam pengelolaan usaha dan keuangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki sikap yang cukup terbuka terhadap keberadaan bank syariah. Rendahnya penggunaan produk bukan disebabkan oleh penolakan terhadap konsep syariah, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, akses layanan, dan minimnya pendampingan yang diterima. Oleh karena itu, apabila edukasi dilakukan secara berkelanjutan dan akses layanan semakin mudah dijangkau, peluang peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Nagari Tanjung Ampalu akan semakin besar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sudah mulai terlihat melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan. Akan tetapi, kontribusi tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan intensitas program, perluasan akses layanan, serta penguatan

kolaborasi dengan pemerintah nagari dan berbagai elemen masyarakat agar manfaat perbankan syariah dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berperan dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pengenalan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perbankan syariah, karakteristik produk, dan mekanisme akad masih belum memadai. Sebagian masyarakat telah mengenal keberadaan bank syariah, namun pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip operasional dan perbedaannya dengan perbankan konvensional masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan syariah masih memerlukan penguatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dari sisi inklusi keuangan, pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah oleh masyarakat juga belum berkembang secara optimal. Rendahnya penggunaan layanan keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses layanan, kurangnya informasi yang diterima masyarakat, serta kebiasaan menggunakan lembaga keuangan konvensional maupun mekanisme keuangan informal yang telah berlangsung dalam waktu lama. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah memerlukan sinergi yang lebih kuat antara perbankan syariah, pemerintah nagari, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui kolaborasi tersebut, penyebarluasan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat dilakukan secara lebih luas sehingga mendorong meningkatnya pemahaman, kepercayaan, dan pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

KNEKS. (2023). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wiroso. (2019). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.